

Konsep Kekuasaan Niccolo Machiavelli: Studi Kasus Kekuasaan Jokowi-Ma'ruf dalam Menyikapi Kelompok Koalisi dan Oposisi

Muhdar¹, Usni²

Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2}

*Email Korespodensi: muhdarafandy@gmail.com

Diterima: 16-08-2026 | Disetujui: 24-08-2026 | Diterbitkan: 26-08-2026

ABSTRACT

*This study aims to analyze Nicolò Machiavelli's concept of power within the context of the Jokowi-Ma'ruf Amin administration, specifically regarding efforts to maintain political stability through the management of relationships with coalition and opposition parties. In his seminal work *The Prince*, Machiavelli emphasizes the importance of pragmatism, cunning, and flexibility in maintaining power. This approach serves as the theoretical framework for understanding the Jokowi-Ma'ruf administration's strategies in managing Indonesia's political dynamics. The study employs a qualitative method using a case study approach. Data were collected through document analysis—including speeches, policies, and public statements by leaders—and analyzed descriptively to identify connections between Machiavelli's theories and the political practices of the Jokowi-Ma'ruf administration. The findings indicate that the government employs strategies of compromise and accommodation to strengthen coalition support while simultaneously embracing the opposition through inclusive policies. In certain respects, this pattern aligns with Machiavellian principles, such as the strategic and manipulative use of power to ensure the administration's stability and continuity. The study concludes that Machiavelli's concept of power remains relevant for interpreting political realities in Indonesia, particularly within the context of a pluralistic and dynamic administration. Consequently, this research offers insights into the importance of a pragmatic approach to managing political relationships in order to maintain harmony and governmental effectiveness amidst the challenges of modern democracy.*

Keywords: Niccolò Machiavelli, Power, Jokowi-Ma'ruf Administration, Coalition Parties, Opposition, Political Stability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kekuasaan Nicolo Machiavelli dalam konteks pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, khususnya dalam upaya menjaga stabilitas politik melalui pengelolaan hubungan dengan partai koalisi dan oposisi. Micolo Machiavelli, dalam karya utamanya *The Prince*, menekankan pentingnya pragmatisme, kelicikan dan fleksibelitas dalam mempertahankan kekuasaan. Pendekatan ini digunakan sebagai kerangka teori untuk memahami strategi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam mengelola dinamika politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, termasuk pidato, kebijakan, serta pernyataan publik para peimpim, dan dianalisis secara deskriptif untuk menemukan keterkaitan antara teori Nicolo Machiavelli dengan praktik politik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah mempraktikkan strategi kompromi dan akomodasi untuk menguatkan dukungan koalisi sekaligus merangkul oposisi melalui kebijakan yang inklusif. Dalam beberapa aspek, pola tersebut selaras dengan prinsip Machiavelli, seperti penggunaan kekuasaan secara strategis dan manipulatif demi stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kekuasaan Nicolo Machiavelli relevan dalam membaca realitas politik di Indonesia, terutama dalam konteks

pemerintahan yang plural dan dinamis. Implikasinya, kajian ini memberikan wawasan pentingnya pendekatan pragmatis dalam mengelola hubungan politik untuk menjaga harmoni dan efektivitas pemerintahan di tengah tantangan demokrasi moderen.

Kata kunci: Nicolo Machiavelli, Kekuasaan, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Partai Koalisi, Oposisi, Stabilitas Politik.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhdar, M., & Usni, U. (2026). Konsep Kekuasaan Niccolo Machiavelli: Studi Kasus Kekuasaan Jokowi-Ma'ruf dalam Menyikapi Kelompok Koalisi dan Oposisi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 3510-3524. <https://doi.org/10.63822/0kqda842>

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan representasi dari pada negara yang menganut sistem demokrasi, bahkan negara yang pemerintahannya memakai sistem demokrasi, pemilu dikonotasikan dari sistem tersebut. Dalam artian pemilu tidak bisa dihilangkan dari demokrasi, karena pada momentumnya semua rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpinnya, bahkan semua kalangan juga mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Begitu konsep dari pada sistem demokrasi.

Berbicara pemilu, ada sebuah kejanggalan rasanya berkaitan dengan kata ‘pemilu’ dikalangan masyarakat saat ini, yang perlu ditegaskan dari pada pemilu di Indonesia salah dalam mengartikannya, sehingga menimbulkan kecacatan dalam menarasikan. Pemilu merupakan sekumpulan dari pemilihan, baik yang tingkatnya nasional maupun ke-daerahan, bahkan di tingkat desa sekalipun, dari sekumpulan itu disebut pemilu. Baik yang di ranah eksekutif maupun di Legislatif, karena di Indonesia hanya ada di dua ranah itu yang mekanismenya menggunakan pemilihan yang melibatkan masyarakat.

Seperti contoh pilpres yang ranahnya eksekutif, termasuk tingkat nasional, ini nantinya yang memenangkan kontestasi namanya presiden, ada juga namanya pilkada, yang termasuk tingkat daerah, nantinya yang memenangkan kontestasi disebut dinamakan Gubernur di tingkat provinsi dan Bupati ditingkat kabupaten. Dan contoh dari ranah legislatif disingkat dengan Pileg (pemilihan legislatif), sama urutannya seperti halnya eksekutif. Ada tingkatan DPR RI yang nasional dan juga DPRD Provinsi/kabupaten/kota yang tingkat daerah.

Dalam latar belakang ini secara spesifik penulis akan menggambarkan kondisi dan situasi perpolitikan di Indonesia dalam kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2019 yang lalu, baik sebelum pemilu itu terlaksana dan juga pasca pemilu. Dalam mengingat keberlangsungan pemilu 2019 ada sesuatu yang membedakan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia, mulai dari pemilu 1999 sampai pemilu 2019. Memang perlu dicatat, bahwa diantara pemilu tahun 1999 sampai pemilu 2019 mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, mulai bagaimana relasi yang dibangun oleh partai-partai politik untuk kemenangannya sampai pasca pemilu pasti ada hiruk pikuknya. Terlepas apapun itu yang terjadi sebagai cacatan perjalanan politik di Indonesia.

Politik adalah seni untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Jika melihat definisi-definisi ilmu politik, yang sampai kini banyak ragamnya, dapat penulis simpulkan bahwa ilmu politik adalah berkenaan dengan hubungan antara manusia satu sama lainnya dalam bentuk adanya pemahaman, penghayatan, sampai pengaturan mengenai “hal-hal memperoleh, mempertahankan, dan menyelenggarakan kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat”. Baik yang timbul dalam hasrat manusia secara sendiri-sendiri dalam kehidupan berkelompok (berorganisasi), maupun yang timbul dari proses interaksi di dalam masyarakat atau kesatuan yang terorganisasi.

Secara garis besar, politik adalah berkenaan dengan kekuasaan pengaruh, kewenangan pengaturan, dan ketaatan atau ketertiban. Jika kita sederhanakan lagi, misalnya bahwa antara daya/kekuasaan dengan pengaruh adalah suatu keseimbangan atau konsekuensi logis. Lalu, diantara kewenangan dan pengaturan juga konsekuensi logis. Sedangkan ketaatan atau ketertiban adalah akibat dan tujuan.

Maka politik atau hal-hal yang menyangkut politik, adalah mencakup tiga unsur atau hal pokok, yaitu:

1. Kekuasaan (power)
2. Kewenangan (authority)

3. Ketaatan/ketertiban (order)

Dari pada itu, sesuatu yang mengantarkan kesitu ada yang namanya pesta demokrasi sebagai bentuk awal dari semuanya, yakni kekuasaan, kewenangan dan ketertiban tentu semua itu tergantung bagaimana hal tersebut disebut patut ketika nantinya siapa yang akan menjadi pemangku kebijakan sebagai penguasa sehingga, tujuan atau falsafah dari pada adanya politik itu tercapai, yakni adanya ketertiban di sebuah tempat yang namanya negara, baik tertib dari aspek internal (hubungan dengan hal ikhwal kemasyarakatan) maupun tertib dari aspek hubungan eksternalnya (negara dengan negara). Itu juga

Pemilihan presiden 2019 ada dua paslon kandidat yang berkontestasi, yaitu pasangan dari Jokowi-Ma'ruf sebagai paslon nomor urut satu dengan partai pengusung Partai PDI-P, PKB, PPP, Nasdem, Partai Golkar, Partai Hanura, dan tiga partai non parlemen yaitu, Partai Perindo, PSI, PKPI. Dan paslon kandidat Prabowo-Sandi sebagai paslon nomor dua dengan partai pengusung Partai Gerindra, PKS, PAN dan Partai Demokrat yang pada akhirnya pasangan Jokowi-Ma'ruf yang terpilih menjadi Presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Namun hal yang sangat menarik pada periode jilid dua pemerintahan Jokowi, meleburnya pasangan Prabowo-Sandi, kedua-duanya menjadi menteri di pemerintahan Indonesia bersatu. Hal seperti ini menjadi sorotan publik dan perbincangan semua kalangan, mulai dari para kaum akademisi, politisi, dan masyarakat pada umumnya, terlebih para pendukung Prabowo-Sandi yang seakan-akan dikhianati diwaktu pemilihan presiden 2019. Yang seharusnya Prabowo dan Sandi menjadi antitesis dari pada pemerintahan Indonesia sebagai penyeimbang dari kekuatan-kekuatan politik di Indonesia, untuk saling menguatkan struktur politik, yakni infrastruktur dan suprastruktur politik, sehingga kekuasaan yang ada bisa diawasi demi mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih.

Kekuasaan adalah dipegang oleh presiden karena sifat dari negara adalah monopilitis. Apapun semua yang dikehendaki boleh saja dilakukan baik meskipun kekuasaan tersebut hanya menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok tertentu, itu semua akan terjadi jika check and balance diperlemah dengan cara mempersatukan antara pihak oposisi diajak membangun bersama-sama untuk kemajuan negara. Itu gambaran kecil nilai plus minusnya.

Dan itu semua dipelopori oleh pemerintahan Jokowi jilid 2. Tidak pernah terjadi pada masa-masa pemerintahan sebelumnya, rekrutmen kabinet di kementriannya pihak oposisi ikut direkrut. Apapun itu alasannya dirasa kurang efektif, memang hal itu tidak ada aturan maupun konstitusi yang mengikat rekrutmen kabinet itu harus berasal dari pihak koalisi. Namun idealnya dalam lingkaran koalisi tersebut ada kontrak politik yang harus dipertimbangkan. Kepentingan apa sebetulnya sampai-sampai pemerintahan Jokowi jilid 2 ini pihak oposisinya diajak merapat ke kabinetnya.?

Dan juga yang perlu dipertanyakan kenapa Prabowo-Sandi harus merapat ke kubu Jokowi, karena ketika melihat dinamika pemilihan presiden 2019 begitu alot dan memanas sampai hari ini yang menciptakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Ini semua juga perlu ketegasan dari pihak Prabowo dan Sandi mau diposisi oposisi sebagai penyeimbang (*chek and balance*) dari pada pemerintahan Jokowi, bukankah hal yang demikian juga perlu dipertimbangkan sematang mungkin.

Atau mereka jadikan pemilu sebagai goyongan belaka untuk menghindari dari bobroknya sistem demokrasi kita?. Karena pada nyatanya ada banyak embel-embel yang menaraskan sebuah sistem demokrasi yang merucut pada kekuasaan tirani. Itu semua mempertanyakan letak sisi demokrasi ketika kekuatan-kekuatan politik di negeri ini dalam satu pangkuan suara?

DPR yang mau diandalkan sebagai *check and balance* terkuat yang berada dalam sistem mau dijadikan alasan sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang dan tugas untuk kontroling terhadap eksekutif? Percaya atau tidak dan memang sedang trendnya hari ini para pejabat kita di Istana sana, di Senayan sana, mereka semua ada dikendali partai, bagaimana kalau orang-orang yang duduk di kursi parlemen dikubur partai yang sama. Kekuatan apa yang masih diharapkan ketika eksekutif dan legislatif berinduk pada partai yang sama? Emang begitu alur cerita lembaga-lembaga pemerintahan hari ini.

Contoh lain yang juga menjadi sebuah kegagalan sampai hari ini adalah kabinet-kabinet di pemerintahan orang-orang petinggi partai, mulai dari ketua partainya, sekjennya dan orang-orang yang diperhitungkan dalam sebuah partai. Lalu di parlemen adalah ada bawahan-bawahan secara struktural di kepartaian, boleh saja itu dijadikan kesempatan untuk mengaminkan apapun yang diintruksikan oleh atasannya (presiden) melalui rapat-rapat pembuatan undang-undang (prolegnas) yang seakan-akan berkesan undang-undang pesanan dari segelintir orang atau kelompok tertentu. Semua akan berjalan mulus ketika ada sebuah ancaman terhadap orang yang sedang berada di kabinetnya. Begitulah potret hubungan lembaga eksekutif dan legislatif yang sering digaung-gaungkan sebagai *check and balance*. Kalau masuk teori dalam sebuah teori politik yang kalem adalah disebut '*eksekutif happy*'.

Dan semua itu dikhawatirkan oleh semua kalangan masyarakat. Kita harus mengulas panjang sejarah pemerintahan secara filosofis, bukan hanya soal taktis bagaimana cara mendapatkan sebuah kuasa, itu hanya musiman saja, ketika pilihan kita adalah yang kurang memahami bagaimana fungsi secara filosofis terbentuknya sebuah negara akan menimbulkan kekacauan yang memunculkan benang merah dalam persoalan kemaslahatan bangsa dan negara.

Ada persoalan yang cukup serius untuk lebih lanjut mempertimbangkan bagaimana melihat korelasi antara praktek dan teori yang dikeluarkan oleh seorang filsuf sekaligus tokoh politik yang hidup pada zaman abad ke-16, dengan teori kekuasaan menurut Nicolo Machiavelli. Bagaimana hari ini melihat teori-teori yang dikembangkan pada masa itu apakah masih punya korelasi yang cukup kuat untuk menguak dinamika-dinamika politik yang terjadi pada zaman modern ini, khususnya perkembangan politik di Indonesia.

Teori tersebut perlu ditelisik lebih lanjut dan mendalam apakah hari ini ada dalam sebuah praktek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga penulis berfikir dan termenung atas kejadian bagaimana praktek kekuasaan di Indonesia tercium adanya gejala-gejala serupa yang pusat perhatian dari pada pemikiran politik Nicolo Machivelli ini dengan "politik bebas nilainya" secara spesifik pemegang kekuasaan untuk memainkan peranan penting dalam kebijakannya.

Dan ketika dikorelasi dengan kondisi tubuh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan besarnya koalisi yang dibangun berdampak atas oposisi pemerintah baik sebagai termasuk dalam supranatural politik atau infrastuktur politik yang ada. Adapun oposisi formal pada periode ini seperti halnya tidak nampak, melainkan hanya mengandalkan tekanan lembaga diluar pemerintahan, seperti LSM dan lembaga-lembaga lainnya.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan

membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa jurnal-jurnal, koran, maupun hasil penelitian.

Kemudian hasil penelitian itu akan dipaparkan berdasarkan data yang telah didapatkan. Penelitian pustaka ini tidak memerlukan partisipasi peneliti di lapangan melainkan merupakan kajian berasal dari teks-teks kemudian dikembangkan sesuai dengan judul penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.

Metode penelitian ini tidak menuntut peneliti harus terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyuman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literature dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah konsep kekuasaan Nicolo Machiavelli studi kasus pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam menyikapi partai oposisi dan koalisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Politik Machiavelli

Dalam tradisi kehidupan masyarakat Eropa pada masa Renaisans, pemikiran yang muncul dari seorang pemikir Politik masa itu, Nicolo Machiavelli pemikirannya benar-benar menohok terhadap persoalan politik. Baginya politik tidak lagi berkembang sebagaimana harusnya, seperti pandangan mazhab idealisme yang berkembang masa sebelumnya, melainkan harus dipahami dari segi realitas konteks yang sedang terjadi dalam praktek-praktek kekuasaan itu berlangsung. Dimensi politik hanyalah bersifat sekuler, yang condong terhadap persoalan duniawi semata dengan mengikuti corak perkembangan kehidupan manusia. Pengaruh filsafat moral dan politik yang dibentuknya, nama Machiavelli sejajar dengan para pemikir-pemikir seperti Socrates, Plato, Cicero di masa lampau.

Seorang pemikir selalu membentuk pemikiran dengan pola-pola yang berkaitan dengan konteks realitas hidup yang sedang dijalani, bahkan pemikiran yang monoton sering dijadikan sebagai sumber masalah dalam pemikirannya, sehingga memunculkan adanya pemikiran brutal namun hadirnya membawa kemaslahatan terhadap ruang lingkup hidup lingkungan, sampai mempunyai relevansi dengan pandangan-pandangan terhadap dunia. Tak terkecuali buah prinsip-prinsip politik dari Machiavelli yang menajalar berkembang pada politik modern saat ini.

Prinsip-prinsip politik Machiavelli sering dianggap kontroversial karena mengesampingkan moralitas demi tujuan politik praktis. Namun banyak yang melihat karyanya sebagai analisis realistis tentang kekuasaan dan bagaimana pemimpin dapat bertahan dalam situasi politik yang berbahaya dan tidak menentu. Pemikiran Machiavelli sering dianggap sebagai fondasi dari teori politik modern yang mengakui kompleksitas dan realitas keras dalam praktik pemerintahan. Berikut beberapa poin penting yang dibahas dalam karyanya:

1. Machiavelli sangat menekankan pentingnya pemimpin untuk mempertimbangkan kepentingan negara di atas segalanya. Tujuan utama seorang pemimpin adalah mempertahankan kekuasaan dan kestabilan negara. Untuk mencapai tujuan ini, pemimpin harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan, terlepas dari moralitas. Pemimpin harus siap menggunakan kekuasaan dan manipulasi politik untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Machiavelli menyoroti pentingnya kecerdikan dan kebijaksanaan dalam menjalankan kekuasaan. ia menyertakan bahwa pemimpin harus cerdas dalam membaca situasi politik, memahami dinamika kekuasaan, dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Machiavelli menekankan bahwa pemimpin harus fleksibel dan siap beradaptasi dengan situasi yang terus berubah untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
3. Machiavelli membahas strategi dan taktik yang efektif dalam mempertahankan kekuasaan. ia menguraikan prinsip-prinsip politik seperti membangun sekutu yang kuat, memenangkan kepercayaan rakyat, dan mengendalikan elit politik. Machiavelli menekankan pentingnya kekuasaan yang kokoh dan tidak bergantung pada faktor-faktor yang tidak bisa diandalkan.

Dalam pemaparan poin-poin di atas Machiavelli menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu membaca situasi dan kondisi politik dalam rangka mempertahankan kekuasaan demi kelancaran dan kestabilan roda pemerintahan dengan tindakan ataupun segala macam cara apapun. Bahkan jika perlu memainkan manipulasi politik yang radikal dan juga membuat bangunan yang kuat dalam tubuh pemerintah.

Strategi Politik Machiavelli

Niccolo Machiavelli adalah seorang diplomat dan politikus asal Italia, Machiavelli hidup pada masa ketidakstabilan sosial dan politik di Italia, yang ditandai oleh konflik di berbagai kota, kemunculan para tiran, serta pengkhianatan politik, konspirasi, dan pembunuhan. Dalam konteks inilah Machiavelli membangun filsafat politiknya. Antara lain strategi politik Machiavelli;

1. Realitas Politik

Machiavelli memahami realitas politik melalui aksi bangsa-bangsa dan interaksi internasional yang diwarnai kepentingan masing-masing. Ia melihat bahwa hubungan internasional dan perilaku politik dalam negeri didominasi oleh anarki kekuasaan dan kemerosotan moral. Praktik politik menurutnya, cenderung berulang sepanjang sejarah, dengan penguasa menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Machiavelli menekankan pentingnya tindakan nyata dan panduan operasional bagi penguasa, mencerminkan pandangannya sebagai politikus praktis dan filsuf politik yang berpengaruh.

Bukan tanpa alasan memandang realitas politik sebagai salah satu faktor penting dipandang sebagai gejala masa itu, karena memang sedang ada trendnya problematika bangsa-bangsa dalam banyak sektor, sehingga Machiavelli dalam ungkapan strategi politiknya menekankan terhadap para penguasa untuk melihat dinamika sosial kenegaraan dan kebangsaan, oleh karena ia bersikap sedemikian untuk menghadapi dunia atau negara yang sedang tidak baik-baik saja.

Dalam kesaksian Machiavelli tentang realitas hubungan internasional terutama dalam perbaikan kepentingan ekonomi dalam masing-masing negara. Peninggalan sejarah dalam hal hubungan diplomasi

2. Kekuasaan dan Moralitas

Di tengah kekacauan di bidang religius dan disintegrasi moralitas publik, Machiavelli menekankan bahwa yang utama dalam kekuasaan bukanlah soal legitimasi moral, tetapi bagaimana membuat kekuasaan yang tidak stabil menjadi stabil dan bertahan lama. Pandangan politiknya berbeda dari pandangan tradisional pada masanya, yang menganggap tugas utama pemerintah adalah distribusi dan pemeliharaan keadilan. Menurut Machiavelli, pandangan tradisional ini tidak sesuai dengan praktik kekuasaan yang ia amati dan alami selama hidupnya, serta tidak cocok dengan praktik politik pada masa kejayaan kekaisaran Romawi. Menurut Machiavelli penguasa bukanlah personifikasi dari keutamaan-keutamaan moral. Ia menganut semacam sinisme moral dalam filsafat politik. Dari semua tujuan usaha penguasa adalah mempertahankan stabilitas suatu negara, negara tetap tegak, dan ketika dihadapi dengan ancaman, langkah-langkah penyelamatan dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut. Dalam mengambil tindakan, pertimbangan yang dilakukan oleh penguasa tanpa penilaian baik buruk dari masyarakat, melainkan yang lebih ditekankan dari segi efisiensi secara politik terikat dengan keadaan dan situasi sosial yang mendesak.

Dalam kaitannya dengan pertahanan dan ekspansi kekuasaan, Machiavelli berpendapat bahwa penguasa tidak perlu menjadi representasi dari nilai-nilai moral. Machiavelli mengadopsi pandangan yang sinis secara moral dalam filsafat politiknya. Tujuan utama dari setiap tindakan penguasa adalah untuk mempertahankan stabilitas negara, memastikan negara tetap eksis, dan melakukan tindakan pencegahan terhadap ancaman. Dalam mengambil keputusan, penguasa tidak perlu mempertimbangkan keinginan rakyat atau apakah tindakan tersebut dianggap baik atau buruk oleh masyarakat, tetapi harus berfokus pada efisiensi politik. Pilihan tindakan harus didasarkan pada situasi dan tuntutan sosial yang mendesak.

Salah satu tokoh yang telah menerapkan pola manajemen kekuasaan yang baru dan memisahkan tindakan politik dari penilaian moral adalah Cesare Borgia. Tindakan-tindakan politik Borgia merupakan contoh ideal dalam prosedur yang benar untuk memperkuat kekuasaan bagi para penguasa. Sebagai contoh, ketika seorang penguasa baru ingin mengamankan kekuasaannya di wilayah yang baru dikuasainya, Machiavelli menyarankan bahwa keluarga penguasa sebelumnya harus dimusnahkan. Kekejaman dapat digunakan oleh penguasa sesuai dengan kebutuhan dan situasi untuk sepenuhnya menguasai wilayah baru, karena semua ancaman terhadap kekuasaan dapat diatasi dan dihilangkan. Setelah kekuasaan stabil dan berada dalam genggamannya penguasa, langkah politik berikutnya adalah menarik simpati rakyat dengan berbagai bantuan.

3. Angkatan Bersenjata dan Patriotisme

Untuk membangun suatu pemerintahan harus mempunyai dasar yang kuat agar kekuasaan tersebut berjalan dengan stabil. Dasar stabilitas kekuasaan adalah hukum yang baik dan angkatan bersenjata yang baik pula. Akan tetapi pandangan Machiavelli sistem hukum yang baik tidak akan tercipta sebelum membangun angkatan bersenjata yang baik, karena adanya angkatan bersenjata yang baik akan tercipta sistem hukum yang baik pula. Salah satu terjaminnya negara atas kemerdekaannya adanya kekuatan angkatan bersenjata yang tangguh dan disiplin sebagai instrumen. Kegiatan militer yang baik dan disiplin akan berdampak terhadap keefektifan suatu perjuangan negara. Oleh karenanya tumpuan perjuangan politik berada pada senjata dan senjata merupakan sesuatu yang suci dalam perjuangan politik.

Sang penguasa dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan suatu negara bisa mendapatkan dari jasa asing, yakni tentara bayaran. Machiavelli mengemukakan hal demikian, dalam memanfaatkan tentara

asing justru bisa membahayakan terhadap efektivitas dan eksistensi negara. Kestabilan politik adanya senjata bayaran tidak akan tercapai dengan perlakuan itu. Machiavelli mengupayakan adanya pembentukan militer yang terorganisir dengan baik, begitu juga adanya pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota yang baik. Organisasi militer tersebut murni dari masyarakat sendiri dari suatu negara. Salah satu warga negaranya ditunjuk menjadi panglima oleh penguasa. Dalam menjaga kedisiplinan panglima tentara harus dibatasi oleh undang-undang, supaya kebijaksanannya tidak menyimpang dari pada tujuan atau kehendak yang diinginkan oleh kepala negara. Panglima harus memiliki vitalitas yang tinggi sehingga mampu menyebarkan vitalitasnya kepada anggota tentara yang lain dan pada gilirannya angkatan bersenjata yang memiliki vitalitas akan menularkan semangat itu kepada masyarakat luas, sehingga pada akhirnya berdampak meningkatnya vitalitas masyarakat. Dengan meningkatnya vitalitas masyarakat akan mampu mempertahankan keamanan dan serangan lawan.

Untuk meningkatkan vitalitas masyarakat secara keseluruhan, seorang ahli propaganda dapat menggunakan patriotisme sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Patriotisme bisa ditingkatkan hingga menjadi semacam "agama baru." Penguasa dapat memanfaatkan patriotisme sebagai kedok untuk membenarkan tindakan-tindakan politik yang kontroversial, sehingga rakyat dapat dibohongi. Misalnya, jika seorang penguasa membunuh mantan rekan seperjuangannya demi kepentingan ekonomi, ia bisa menghadapi kemarahan massa yang tidak setuju dengan motivasi tersebut. Namun, jika penguasa itu memberi tahu rakyat bahwa ia mengamankan rekan seperjuangannya demi menyelamatkan eksistensi negara, maka tindakan yang sama dapat membuat rakyat menganggapnya sebagai pahlawan bangsa. Dengan memanfaatkan patriotisme, kesatuan negara bisa dikelola dan dipertahankan.

Machiavelli mengungkapkan apa yang mungkin tersembunyi di balik slogan patriotisme, yaitu cara-cara yang digunakan penguasa untuk membangkitkan semangat rakyat. Penguasa sering memanfaatkan patriotisme karena sebagian besar rakyat tidak mampu memahami sepenuhnya kompleksitas isu-isu politik dan ekonomi negara. Patriotisme membantu menyederhanakan masalah yang rumit, meredakan perbedaan pendapat, dan mengatasi pertentangan tentang isu-isu yang telah dibahas. Hal ini juga memberikan rasa kebenaran dan kepastian bagi orang-orang yang berpikiran sederhana.

Berdasarkan pengalamannya sebagai penasihat pertahanan dan keamanan negara Florence, Machiavelli memperkenalkan berbagai masalah kemiliteran yang baru. Ia menyarankan agar penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaan mengembangkan doktrin militer yang sesuai dengan keyakinan politiknya. Menurutnya, lembaga militer yang kuat dan disiplin adalah syarat mutlak untuk menjaga kemerdekaan politik. Selain itu, Machiavelli memperkenalkan konsep wajib militer bagi semua warga negara dalam situasi darurat perang. Lembaga pertahanan militer dianggapnya sebagai bagian penting dari kekuasaan negara. Wajib militer untuk warga negara sendiri lebih efektif daripada mengandalkan tentara bayaran, terutama untuk melindungi dan mempertahankan keamanan dalam negeri. Tentara yang berasal dari rakyat akan bertempur dengan gigih untuk membela negara, terutama jika mereka diyakinkan oleh doktrin perjuangan bahwa kemenangan perang akan menentukan masa depan bangsa dan negara mereka. Dengan demikian, Machiavelli juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu kemiliteran modern.

Pemerintahan Jokowi Dan Ma'ruf Amin

Kebijakan Koalisi

1) Pembentukan Koalisi Besar

Koalisi merupakan suatu hal yang lazim dilakukan oleh presiden untuk memperoleh dukungan parlemen secara konstitusional. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia multi partai yang menjadi suatu yang sulit bagi partai politik memperoleh suara mayoritas di parlemen, sehingga membutuhkan partai lain dalam membagi tugas-tugas kenegaraan dalam kabinet yang membantu presiden. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Djayadi Hanan bahwa dalam sistem multi partai untuk mendapatkan mayoritas dukungan parlemen satu-satunya cara dengan berkoalisi.

Menjadi keniscayaan dalam multi partai untuk memperkuat dukungan parlemen dalam memperkuat pemerintahan tanpa adanya pembentukan koalisi yang setara bahkan memperluas basis dukungan itu lebih baik untuk menjaga keseimbangan dan kekuatan pemerintah. Sebab akan menjadi sebaliknya yakni ketika terlalu over partai-partai menjadi opisisi sehingga terciptakan kestabilan pemerintahan akan rendah.

Dan ini terjadi dan menjadi salah satu strategi kebijakan politik pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin khususnya dalam kebijakan membentuk dan menjaga koalisinya dalam rangka memperkuat kekuasaan politiknya.

Dalam ketetapan KPU yang keluar sebagai pemenang menjadi presiden setelah rampungnya dinamika elektoral politik 2019 Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 yang mendapatkan banyak dukungan dari partai politik yang lolos parlemen, sehingga mendapat dukungan dari parlemen mencapai 60,69% atau 349 kursi di DPR. Yang terdiri dari partai PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Dengan rincian masing-masing partai; PDIP memperoleh 128 kursi (22,26%), Golkar 85 kursi (14,78%), Nasdem 59 kursi (10,26%), PKB 58 kursi (10,09%), dan PPP 19 kursi (3,30%).

Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar berstatment bahwa koalisi yang ada di barisan koalisi KIK (Koalisi Indonesia Kerja) dirasa cukup stabil karena partai yang mengendalikan parlemen dengan urutan kedua, sehingga dampaknya terhadap pemerintahan akan berbuah baik. Namun disisi lain yang keluar dari pandangan direktur eksekutif lembaga survei Indo Barometer (Muhammad Qodari). Dengan jumlah koalisi yang dimiliki pemerintah Jokowi-Ma'ruf sangat rentan akan berkurang (keluar atau lari) dari koalisi, menurutnya jika ada satu atau dua partai yang keluar berdampak terhadap kurang dari 50% dukungan parlemen, sehingga berdampak terhadap stabilitas politik yang memerlukan persetujuan parlemen. Jika bisa lebih baik menambah satu, atau dua partai dengan presentase basis dukungan parlemen mencapai 70% lebih aman dan jika dikehendaki partai Gerindra dan Demokrat diajak dalam koalisi.

Setelah KPU resmi mengumumkan perihal rampungnya elektoral politik 2019 dengan segala dinamikanya, pada pembentukan koalisi sementara pemerintah Jokowi dan Ma'ruf Amin mempunyai basis dukungan dari parlemen 60,69% atau sekitar 349 kursi DPR, impact dari hal ini menjadi salah satu kuatnya pemerintahan dan mensukseskan kebijakan politik pemerintah yang membutuhkan kekuatan dukungan parlemen.

Yang menjadi barisan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin tidak hanya koalisi sedari awal bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang berjuang untuk memenangkan pemilihan presiden kubu 01 (Jokowi-Ma'ruf), namun setelah rampungnya pemilu para petinggi partai saling memutar kepala untuk berlayar dengan kapal besarnya dalam lima tahun ke depan, membawa arah juang partainya untuk

memberikan kontribusi nyata terhadap kemaslahatan, sehingga partai yang dulunya menjadi rival koalisi Indonesia kerja (KIK) yakni partai Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah.

Santer dikabarkan perihal Prabowo diminta presiden Jokowi untuk bergabung telah dikonfirmasi soal kesiapan menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi pembantu kabinet pemerintahan. Dengan komunikasi yang dilakukan Prabowo menyatakan kesiapan apabila “siap apabila diminta”.

Dengan bergabungnya partai Gerindra ke koalisi pemerintah menambah gemuknya koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menjalankan roda pemerintahannya selama satu periode kedepan. Muncul dari seorang pakar politik Universitas Indonesia (UI), Hurriyah, memandang pada periode kedua pemerintahan Jokowi fokus untuk manganmankan dukungan para elit politik, sehingga melakukan strategis merangkul elite politik sebanyak-banyaknya.

Pernyataan yang dilakukan Hurriyah “tapi ketika kita berbicara apakah ini baik untuk politik Indonesia ke depan, saya lihat ini sinyal negatif untuk perkembangan demokrasi Indonesia kedepannya”. Dia menambahkan ke depan, Jokowi akan terkemdale dalam mengelola “koalisi gemuk” karena sulitnya menggabungkan partai politik dalam gerbong yang sama. Ujar Hurriyah ke BBC News Indonesia, Selasa (22/10).

2) Distribusi Jabatan di Kabinet

Distribusi jabatan menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-ma’ruf di sesuaikan dengan jumlah partai di koalisi. *“ada sekian partai koalisi tentu jumlahnya disesuaikan (untuk masing-masing partai).”* (Ma’ruf Amin 5/7/2019). Ungkapan yang disampaikan ketika selesai pertemuan dengan ketua umum partai PKB.

Koalisi yang terbentuk di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ada sembilan partai politik, (PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Hanura, Perindro, PKPI, dan PSI), sebagai pengusung sejak awal pemilu dan ada tambahan dari partai oposisi waktu pemilu yaitu partai Gerindra.

Pasangan presiden Joko Widodo dan wakil Ma’ruf Amin sudah mengumumkan personalia susunan menteri dalam kabinet yang akan membantunya melaksanakan dan tanggung jawab untuk menjalani roda pemerintahan dalam satu periode 2019-2024. Berikut adalah nama-nama menteri kabinet dan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya, berdasarkan daftar susunan yang dibacakan Joko Widodo:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Muhammad Mahfud.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan
5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
9. Menteri Agama: Fachrul Razi
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: Dokter Terawan
14. Menteri Sosial: Julia Batubara

15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah
16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya
21. Menteri Komonikasi dan Informatika: Johnny G. Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar
26. Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kehutanan: Sofjan Jalil
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
28. Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir
30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin

Dari beberapa menteri kabinet yang terpilih Presiden Joko Widodo berharap para menteri tersebut adalah sosok yang kaya akan inovasi baru dan tidak terjebak oleh rutinitas yang monoton. Dengan kekuatan yang begitu besar bisa menghadirkan kekuasaan yang stabil dalam pemerintahan.

Setrategi Menghadapi Oposisi

1) Manuver Strategis Terhadap Oposisi

Iklim politik Indonesia sangat dinamis apalagi dilihat dari kacamata perilaku elit politik pada pemilihan umum 2019. Keberpindahan elit politik sudah menjadi rutinan setiap ada agenda pembaruan pemerintahan. Banyak perubahan yang terjadi perilaku yang dilakukan oleh para petinggi partai, tentu ini tidak terlepas daripada kontrak-kontrak dalam perjanjian yang di masyawarahkan, pendekatan yang dilakukan dalam aspek kepentingan untuk kekuasaan. Pada periode jilid dua pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menekankan adanya rekonsiliasi terhadap partai yang awalnya menjadi oposisi, ini salah satu manuver pemerintahan untuk menghadapi ancaman dari oposisi, oposisi diajak bekerja sama-sama dalam membangun negara. Sehingga disatu sisi memperkuat kekuatan pemerintah, namun disisi lain berdampak terhadap adanya sistem demokrasi Indonesia.

2) Kooptasi

Dalam perseteruan elektoral politik 2019 antara dua kelompok partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden yaitu antara koalisi Indonesia Kerja yang beranggotakan partai PDIP, dan koalisi Indonesia Adil Sejahtera yang beranggotakan (Gerindra, PKS, PAN, Demokrat) dalam koalisi Indonesia Adil Sejahtera partai Gerindra sebagai sarter atau istilah lain sebagai kunci dari terjadinya oposisi yang kuat, sehingga dirongrong supaya masuk bergabung ke dalam pemerintahan.

Pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mengkooptasikan para partai oposisi dengan cara memberikan jabatan strategis di pemerintahannya dalam hal ini partai Gerindra, Prabowo sebagai ketua umum menjabat menteri pertahanan. Ini akan menguatkan dukungan terhadap pemerintah dan akan menjadi magnet terhadap partai-partai koalisi yang berafiliasi dengan partai Gerindra ketika pemilu berlangsung pada pemilihan umum 2019 lalu.

Skema yang dilakukan bentuknya adalah mengkooptasikan atas kepentingan-kepentingan yang terakomodasi dalam tubuh pemerintah supaya menguatkan relasi politik kelembangan, karena bagaimanapun antara lembaga pemerintah sebagai kebutuhan untuk menjadi bagian dari berbagai proses dalam pengambilan kebijakan, lebih-lebih dalam perihal perundang-undangan dan pengawasan yang dilakukan.

Dampak Koalisi Besar Terhadap Oposisi

1) Kebijakan Absolut

Berbagai diskursus dalam berbangsa dan bernegara, khusus dalam relasi-relasi lembaga negara yang pada seyogyanya kedudukan setara yang tertampung dalam trias politica, gagasan-gagasan besar tentang ini masih menjadi bola liar dalam prakteknya, sebab sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat yang mempunyai konsentrasi dalam melihat muslihat-muslihat perpolitikan di Indonesia yang sangat dinamis.

Absolutisme dalam menentukan suatu kebijakan sangat mungkin terjadi ketika dalam berbagai sektor lembaga-lembaga negara sudah menjadi atau didominasi suatu pusaran kekuasaan yang sama, sehingga berdampak terhadap bangunan awal dari pada adanya lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing saling mengintervensi terhadap satu sama yang lain, artinya aspek proporsionalisme dan aspek profesionalisme dalam tidak berjalan ketika ada perintah dari yang memiliki super power kekuasaan.

Fokus utama dalam hal ini adalah keterikatan dan keterkaitan dengan trias politika bagaimana siklus terjadinya dan kondisi ketika adanya koalisi yang besar semua hanya tunduk dan patuh perintah dari tuan. Seperti ini terjadinya kekuasaan itu mengintervensi dalam lingkup trias politika itu sendiri, melihat besarnya koalisi di tubuh pemerintahan (*eksekutif*) akan berdampak terhadap pengambilan keputusan maupun kebijakan yang berada di parlemen (*legislatif*) dan orang-orang yang ada di legislatif merupakan hasil kompromi para petinggi partai, apapun yang dikendaki akan terjadi kebijakan yang absolut. Meskipun ada sedikit suara yang menolak ataupun mengafirmasi terhadap aspirasi masyarakat akan kalah, karena sistem musyawarah kita di Indonesia adalah hukum mayoritas dan hukum minoritas.

Begitu juga dengan badan *Yudikatif* letak intervensi kekuasaan terjadi atau pelemahan-pelemahan yang dilakukan karena yang mengangkat para hakim usul dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif itu sendiri. Ini merupakan siklus terjadinya intervensi ditubuh lembaga-lembaga negara yang seharusnya menjadi *check and balance* dan menjadi lembaga yang independen, bahkan faktor dari pada itu semua sampai mengerucut terhadap lembaga diluar pemerintahan.

2) Keadilan Tidak Merata

Tebang pilih hukum akan terjadi dan berlangsung atas ketiadaan pengawasan dari pada kekuasaan. Kekuasaan akan berlabuh dan membela bukan siapa yang benar bukan bentuk dari masalah itu sendiri, akan tetapi siapa yang melakukan bukan ditinjau dari aspek permasalahan itu sendiri. Sebesar apapun kasusnya bukan dilihat dari pada kasus itu sendiri, melainkan siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korban.

Salah satu kasus HAM berat yang terjadi pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah kasus KM 50 yang sampai hari ini masih menjadi masalah serius tentang tebang pilihnya keadilan. Yang mempunyai tugas moral dalam kasus ini adalah pemerintah itu sendiri, seperti ini jadinya ketika oposisi secara kelembagaan ataupun secara struktur dalam unsur-unsur politik tidak ada semuanya kejadian yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia ketika yang menjadi korban adalah pihak-pihak atau kelompok yang bersebrangan dengan pemerintah sering berakhir dengan bumerang yang alasannya berada diluar nalar.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisa yang penulis temui pada penelitian ini. Menemukan pandangan-pandangan politik kekuasaan Nicolo Machiavelli yang berupa prinsip-prinsip dan strategi yang menjadi ciri khas dari pemikirannya. Diantara prinsip-prinsip yang ia tekankan dalam pandangan politiknya tentang memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

- 1) Seorang penguasa untuk mempertahankan kekuasaan ditekankan membangun sekutu yang besar, mempengaruhi elit politik dan membangun kepercayaan masyarakat.
- 2) Memelihara kelompok penentang (oposisi) pemerintah untuk sama-sama berada dalam lingkaran kekuasaan. dalam mengajak ke dalam pemerintahan ditekankan adanya kooptasi terhadap lawan dan memberikan posisi jabatan strategis.

Sedangkan dalam sangkut paut dengan konsep-konsep kekuasaan Nicolo Machiavelli selaras dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam menyikapi partai koalisi dan oposisi. Berikut adalah yang terjadi dalm skema pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

- 1) Adanya pembentukan koalisi yang besar dalam pemerintahan, sehingga menguatkan basis dukungan dan dampaknya terhadap pemerintahan dalam menjaga stabilitas politik kekuasaan.
- 2) Kooptasi terhadap oposisi dan menjadi bagian penting dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam hal ini memberikan posisi jabatan strategis terhadap partai Gerindra sebagai rival politiknya dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. Azed Bari Abdul, SH., MH. Dan Amir Makmur, SH., MH, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: PSHTN-FHUI 2005).
- Drs. Rudi May T, S.H.,MIR., M.SC. *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Achmad, Abdilla Fauzi. *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*. (Jakarta: Golden Terayon Press, 2012)
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Andi Offset, (Yogyakarta: 2002)
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Maiwan Muhammad. *Antara Virtu Dan Fortune: Suatu Dimensi Dalam Pemikiran Machiavelli*. (Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi 19.01 (2019).
- Benner, Erica. 2009. *Machiavelli's Ethics*, Princeton: Princeton University Press
- Muhammad, Boim, et al. "Ulasan Buku" *Il Principe*"(Sang Pangeran) Karya Niccolo Machiavelli." Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1.2 (2023)
- Parera M. Frans dan M. Sastrapratedja, "*Niccolo Machiavelli Sang Penguasa*," (PT: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991)
- Edwards, Paul, editor. *The Encyclopedia of Philosophy*. Vol. 5, Macmillan, 1967, p. 120.
- Hanan Djayadi, "Memperkuat Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, Dan Sistem Kepartaian".Jurnal Universitas Paradima13, (2016)
- Pradana, Mahatva Yoga Adi. "Elite Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians." *Journal Of Politics And Policy* (2020): 153-172.
- Anggrainy Cynthia Firda, "Prabowo Hadapi Narasi Pengkhianat di Munas KAHMI, Cerita Soal Pemuda Siap Mati", artikel diakses pada 30 November 2022 dari <https://news.detik.com/d-6434993/prabowo-hadapi-narasi-pengkhianat-di-munas-kahmi-cerita-soal-pemuda-siap-mati>
- Wardi Robertus, "Koalisi Jokowi Kuasai 60,69% Kursi DPR", artikel diakses pada 1 September 2019 dari <https://www.beritasatu.com/news/572679/koalisi-jokowi-kuasai-6069-kursi-dpr>
- Amindoni Ayomi, Kabinet Jokowi: "Gemuk Setelah Prabowo Subianto Merapat ke Pemerintah, Sinyal Negatif Demokrasi Indonesia?", artikel diakses pada 23 Oktober 2019 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50120592>
- Suhandami, Ma'ruf Amin: "Distribusi Jabatan Menteri Disesuaikan Jumlah Partai", diakses pada 6 Juli 2019 dari <https://joglosemarnews.com/2019/07/maruf-amin-distribusi-jabatan-menteri-disesuaikan-jumlah-partai/>
- CNN Indonesia, "Daftar Lengkap Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi", diakses pada 23 Oktober 2019 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191021075434-32-441381/daftar-lengkap-menteri-kabinet-indonesia-maju-jokowi>